

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Gambaran Umum Kabupaten Karawang

Sejak era kolonialisme sampai tahun 1980-an, Karawang dikenal sebagai “Lumbung Padi”, bukan hanya di Jawa Barat tapi juga secara nasional. Mayoritas penduduk Karawang bermata pencaharian sebagai petani, baik itu pemilik lahan maupun buruh. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang secara letak geografis berdekatan dengan kawasan kota penyangga ibu kota sehingga akan berdampak berkembangnya kawasan industri dan meningkatnya arus urbanisasi menuju Kabupaten Karawang. Akibat makin sempitnya persawahan, pengiriman beras ditutup. Warga beralih profesi dari petani menjadi buruh pabrik, pedagang kecil dan kuli. Hanya sebagain kecil yang tetap bertahan sebagai petani. Kesenjangan pun terlihat amat jelas antara penduduk kampung dan perumahan.

Sejak dibukanya Kawasan industri pada 1990-an Karawang telah mengalami perubahan sosial yang dinamis. Pembahasan pada bab ini menyajikan informasi yang lebih detail dansistematis mengenai karakteristik Kecamatan Ciampel secara umum yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan Inspraktur Jalan. Pembahasan di sini akan meliputi letak wilayah desa yang dilewati oleh jalan raya Ciampel, karakteristik kependudukan, fungsi dan peranan wilayah serta sistem perangkutan yang ada. Kabupaten karawang berada di wilayah bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 100 02 - 1070 40 BT dan 50 56 - 60 34 LS. Dengan luas wilayah 1.753,27 km². Secara administratif, Kabupaten Karawang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor
- c. Sebelah Tenggara dibatasi oleh Kabupaten Purwakarta
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Bekasi
- e. Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Sumedang

Jika kita lihat dari kebijakan pengembangan spatial yang ada di Kabupaten Karawang. Maka kenyataan ini sejalan dengan arah Kebijakan Perwilayah Pembangunan Jawa Barat, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam Wilayah Pembangunan Purwasuka, dengan pusat pengembangan utama adalah Kota Cikampek dan pusat pengembangan kedua Kota Karawang. Sesuai dengan karakteristik wilayahnya yaitu terutama sektor pertanian, maka Kabupaten Karawang dalam pengembangan wilayahnya di titik beratkan pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi supra insus serta pengembangan industri terutama yang mendukung sektor pertanian.

Sedangkan Kecamatan Ciampel jika kita telaah secara khsusu. Kecamatan ini merupakan bagian wilayah dari 30 Kecamatan di Kabupaten Karawang yang dahulunya termasuk ke wilayah Kecamatan Telukjambe, diresmikan menjadi Kecamatan pada tanggal 11 Agustus 1999 oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999, tanggal 26 Mei 1999, tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis dan Majalengka.²³

²³ Hamdani Budiaman, Hasil Dan Pembahasan Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Ciampel, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2017, hlm. 21.

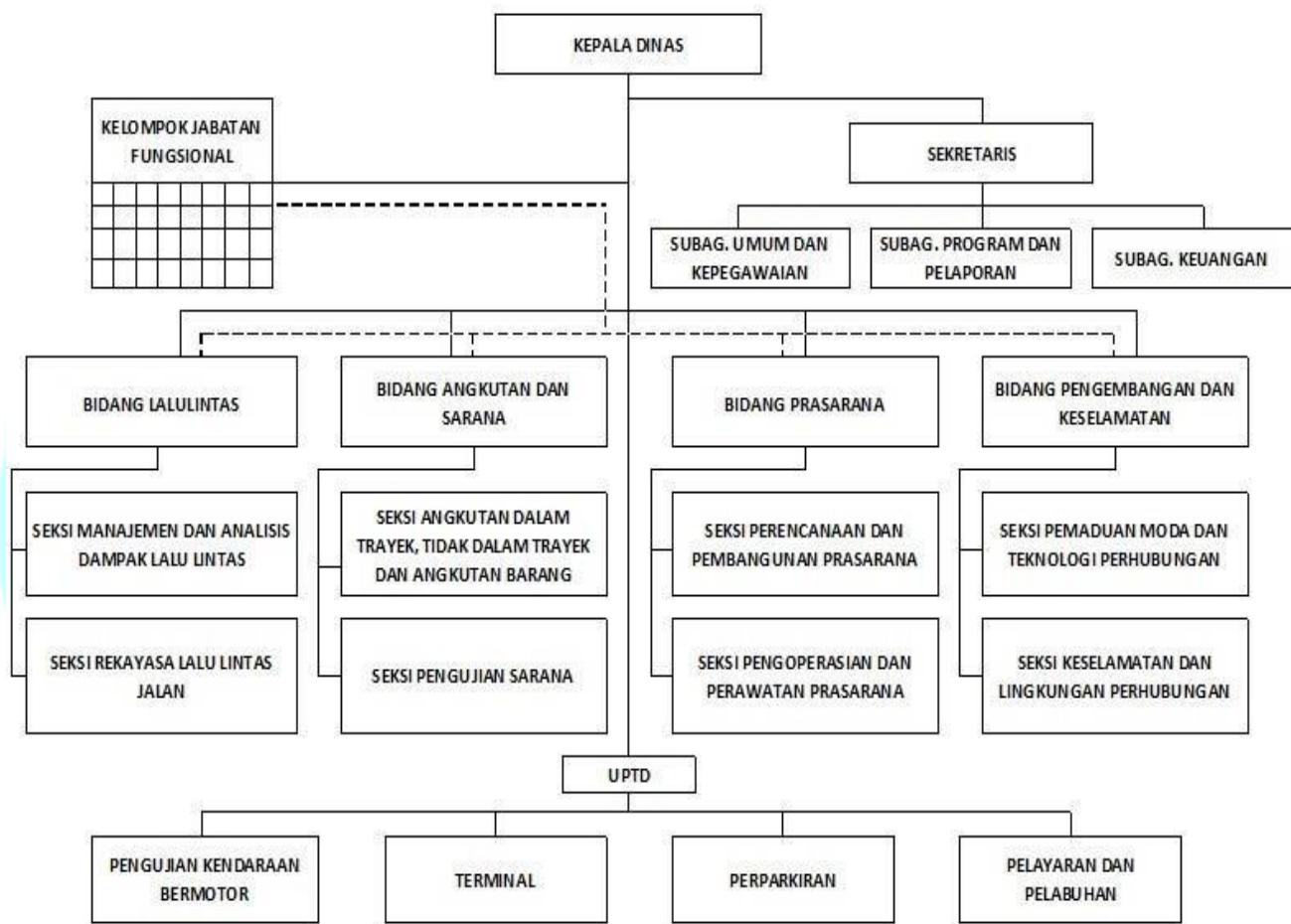
B. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang

Pada awalnya, Dinas Perhubungan hanya melakukan tugas-tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perhubungan, yaitu: pelayanan perizinan, penyelengaraan urusan perhubungan darat, pelayanan pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor, manajemen Terminal Angkutan Penumpang, Manajemen Perparkiran, Pengaturan, Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan membantu sebagian besar tugas Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 sampai dengan 2016. Banyak hal yang perlu mendapat perhatian khusus yang diperlukan dan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, antara lain program sasaran kebijakan dan perencanaan (reorientasi). Reorientasi sasaran bisa diterapkan dengan aturan yang sistematis, didukung oleh tenaga manusia dan profesional, yang mampu menangani tantangan berat dimasa-masa yang akan datang.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Karawang. Dengan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika, maka tanggung jawab Dinas Perhubungan tidak lagi memperhatikan bidang komunikasi dan informatika. Tugas dan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam hal-hal yang meliputi: Pelayanan perizinan, penyelengaraan perhubungan darat, layanan sungai dan laut, Layanan pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor, Manajemen Terminal Angkutan Penumpang, Manajemen Perparkiran, perhubungan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang disebutkan dalam pasal 4 Bab III bahwa Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang, adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah Kepala Daerah. Dengan tujuan untuk pengaturan dan pengurusan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana serta komunikasi dan informatika berdasarkan kebijakan Bupati serta pelaksanaan pengembangan program pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan pelaksanaan pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dengan struktur organisasi dibawah ini:



KARAWANG

Dalam Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Karawang, Dinas Perhubungan memiliki fungsi:

1. Penetapan kebijakan teknis dan / atau bahan-bahan teknis. Daerah dalam hal penyelengaraan urusan kepolisian yang menjadi milik Daerah Perhubungan;
2. Pengkoordinasian pengaturan kekuasaan yang menjadi kuasa Daerah fasilitas perhubungan;
3. Pelaksanaan Pelaporan dan Pemutakhiran Administrasi Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Perhubungan;

4. Pelaksanaan administrasi kantor sesuai dengan tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sedangkan mengenai kinerja tertuang dalam Rencana strategis (RENSTRA).

Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. Sebagai tahapan tahun ke II (dua) pelaksanaan RPJP 2005-2025. Sedangkan dalam skala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang untuk menyusun rencana kerja tahunan. Kedudukan dan perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang harus menyusun rencana strategis (RENSTRA) lima tahunan, agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dapat mengacu kepada program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan visi misi yaitu “Karawang Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” Perencanaan strategis merupakan proses awal yang dibuat secara sistematis dan bekelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, pengorganisasian dengan hierarki pyramida menghasilkan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui indicator keberhasilan.

D. Program Serta Rencana Kegiatan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan secara umum, masih dihadapkan pada peningkatan keselamatan dan kelancaran mobilitas sngkutsn darat, aksesibilitas pelayanan perhubungan terutama pada pelayanan jasa

transportasi di wilayah terpencil, pedesaan dan jalur perbatasan yang menghubungkan antar kabupaten sarana dan prasarannya belum begitu memadai. Sehubung luasnya Kabupaten Karawang serta serbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang khususnya dalam pemberdayaan wilayah dan perekonomian. Demi terwujudnya cita-cita tersebut maka DISHUB Kabupaten Karawang menyusun program dan rencana kegiatan strategis, sebagai berikut;

- 1. Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa**
 - a. Peringatan Hari Perhubungan
 - b. Gelar Pasukan dalam Rangka Upacara PAM Lebaran Tahun 2017
- 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ**
 - a. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light;
 - b. Pengadaan Aspek Traffic Light;
 - c. Pengadaan dan Pemasangan Papan Sosialisasi Kawasan Tiblantas;
 - d. Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Komponen Fasilitas, Perlengkapan Jalan dan Bahan Marka Jalan;
 - e. Pengadaan Mesin Traffic.

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- a. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tk. Provinsi;
- c. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Kabupaten;
- d. Penanganan Demo Angkutan Umum;
- e. Pendataan Angkutan Kota.

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

- a. Naskah Akademis Pembuatan Badan Layanan Umum Perparkiran;
- b. Life Jacket (Pelampung) dan Bendera Kebangsaan Negara Indonesia;
- c. Uji Petik Potensi Parkir;
- d. Pembangunan dan Pemasangan Rambu Khusus Trans Karawang Koridor I;

5. Pembangunan Tangga Beton;

- a. DED Gedung Parkir Vertikal di Karawang Kota;
- b. Kegiatan Pameran dan Pengadaan Sarana Media Pameran;
- c. DED Pantauan Langsung Lalulintas (CCTV) di Kabupaten Karawang;
- d. DED Terminal Klari;
- e. Pembinaan juru parkir dan sosialisasi tarif retribusi;
- f. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Larangan Parkir;
- g. Pengadaan Marka Jalan.

6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- a. PAM Lebaran Tahun 2016, Natal Tahun 2016 dan Tahun Baru 2017;
- b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang;

- c. Pengendalian Gatur Lantas;
- d. Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang;
- e. Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- f. Pengadaan Rambu Larangan Parkir Tipe "F" dan KTL.

7. Keselamatan Transportasi Darat

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

